

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2023



LKjIP



**KECAMATAN SOLOKURO
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucap Puji Syukur Alhamdulillah atas berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah Swt Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Solokuro tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan tepat waktu .

Laporan ini di susun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan Solokuro dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Solokuro dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2023.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP tahun 2023 ini.

Solokuro, Januari 2024



CAMAT SOLOKURO

TRI MUKTASUNG WIJAYANTO, SE

Penata Tk I

Nip. 19681130 201001 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii-iii
IKHTISAR	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
C. DATA UMUM ORGANISASI.....	
1. Personil	10
2. Sarana Dan Prasarana	11
3. Pembiayaan	16
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJiP.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
1. Tujuan.....	18
2. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	19
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023	
PROGRAM DAN KEGIATAN	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	34
1. Pencapaian Kinerja.....	34
2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	35
3. Perbandingan Realisasi Kinerja S/d Akhir Periode RJMD/ RENSTRA.....	40
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional.....	40
5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan.....	40
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	41
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja.....	41
B. REALISASI ANGGARAN.....	42

BAB IV PENUTUP.....	45
1. KESIMPULAN	45
2. SARAN	45
 LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Matrik Rencana Stratejik	
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
4. Lampiran Lainnya (Inovasi Mas PEKA)	

IKHTISAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Berpijak pada Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yaitu :

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-5 ditetapkan tujuan yaitu:

Tujuan : Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan kapasitas manajemen pemerintahan hingga ke Desa.

Sasaran 1 : Meningkatnya layanan Publik yang inovatif

Indikator Sasaran 1 : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sasaran 2 : Meningkatnya kemandirian Desa.

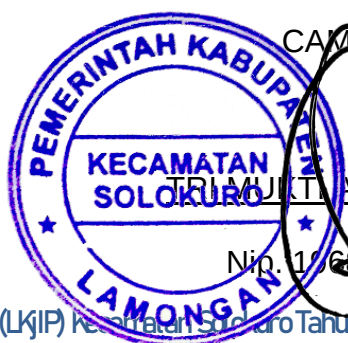
Indikator Sasaran 2 : Persentase peningkatan Desa Mandiri

Dari Visi tersebut diatas perlu adanya strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu kebijakan dan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja. Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program – program tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil sehingga dokumen perencanaan ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu adanya dukungan dan bimbingan dari instansi terkait guna penyempurnaannya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Solokuro, Januari 2023

CAMAT SOLOKURO



TRIMUKTI AGUNG WIJAYANTO, SE
Perata Tk I
Nip. 19681130 201001 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Solokuro, adalah merupakan persyaratan bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita – cita Bangsa, Bernegara adapun guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu Unit Kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas guna mengukur keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan pada Unit kerja perlu dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) agar dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Solokuro, merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama 1 tahun dan sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Solokuro, bertujuan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

B. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kecamatan Solokuro merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Solokuro dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Solokuro mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Solokuro, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:

1. CAMAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

- 1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;

- 2). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Mempunyai Tugas :

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

c. Fungsi Camat :

- 1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan
- 9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
- 10) Penata Tk I dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
- 12) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
- 14) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas Pokok :

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

b. Mempunyai Fungsi :

1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keuangan / Anggaran;
3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tata Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ;
4. Pelaksanaan Penata Tk I dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan Kecamatan ;
5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan;
6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset Kecamatan;
7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan
9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

3. SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan Program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 6) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- 8) Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- 9) Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- 10) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- 11) Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- 4) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- 5) Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- 7) Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG PEMERINTAHAN

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- 6) Melaksanakan fasilitasi, Penata Tk I, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/ atau kelurahan
- 7) Melaksanakan fasilitasi, Penata Tk I, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- 8) Melaksanakan Penata Tk I dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/ atau Lurah beserta perangkat desa dan/ atau perangkat kelurahan;
- 9) Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/ atau kelurahan;
- 10) Menyiapkan bahan Penata Tk I kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan
- 11) Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di lingkup kecamatan
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan
- 13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. PELAYANAN PUBLIK

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- 3) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
- 4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;

- 5) Melaksanakan Penata Tk I dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
- 6) melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- 7) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
- 8) Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ atau kelurahan dan kecamatan
- 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 5) Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, Penata Tk I, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- 7) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;

- 8) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas Pokok :

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan
- 4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 6) Melaksanakan Penata Tk I, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 7) Melaksanakan Penata Tk I Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- 8) Melaksanakan Penata Tk I pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada Camat;
- 11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Solokuro, maka Susunan Organisasi Kecamatan Solokuro adalah sebagai berikut :

a. Camat.

b. Sekretaris Kecamatan membawahi :

1). Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi, dan keuangan, membawahi Staf ;

- a. Bendahara Keuangan
- b. Bendahara Gaji
- c. Verifikator Keuangan
- d. Penyimpan / Bendaharawan Barang dan Pengurus Barang.

2). Kepala Sub Bagian Umum, membawahi Staf ;

- a. Pengadministrasian Umum ;
- b. Pengelola Data Kepegawaian.

c. Kepala Seksi Pemerintahan membawahi staf :

- a. Pengelola Data Pemerintahan Umum ;
- b. Pengelola Data Pemerintahan Desa / Desa ;
- c. Pengelola Data Kependudukan dan Catatan Sipil .

d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi staf :

- a. Pengelola data Kesejahteraan Sosial ;
- b. Pengelola Data Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

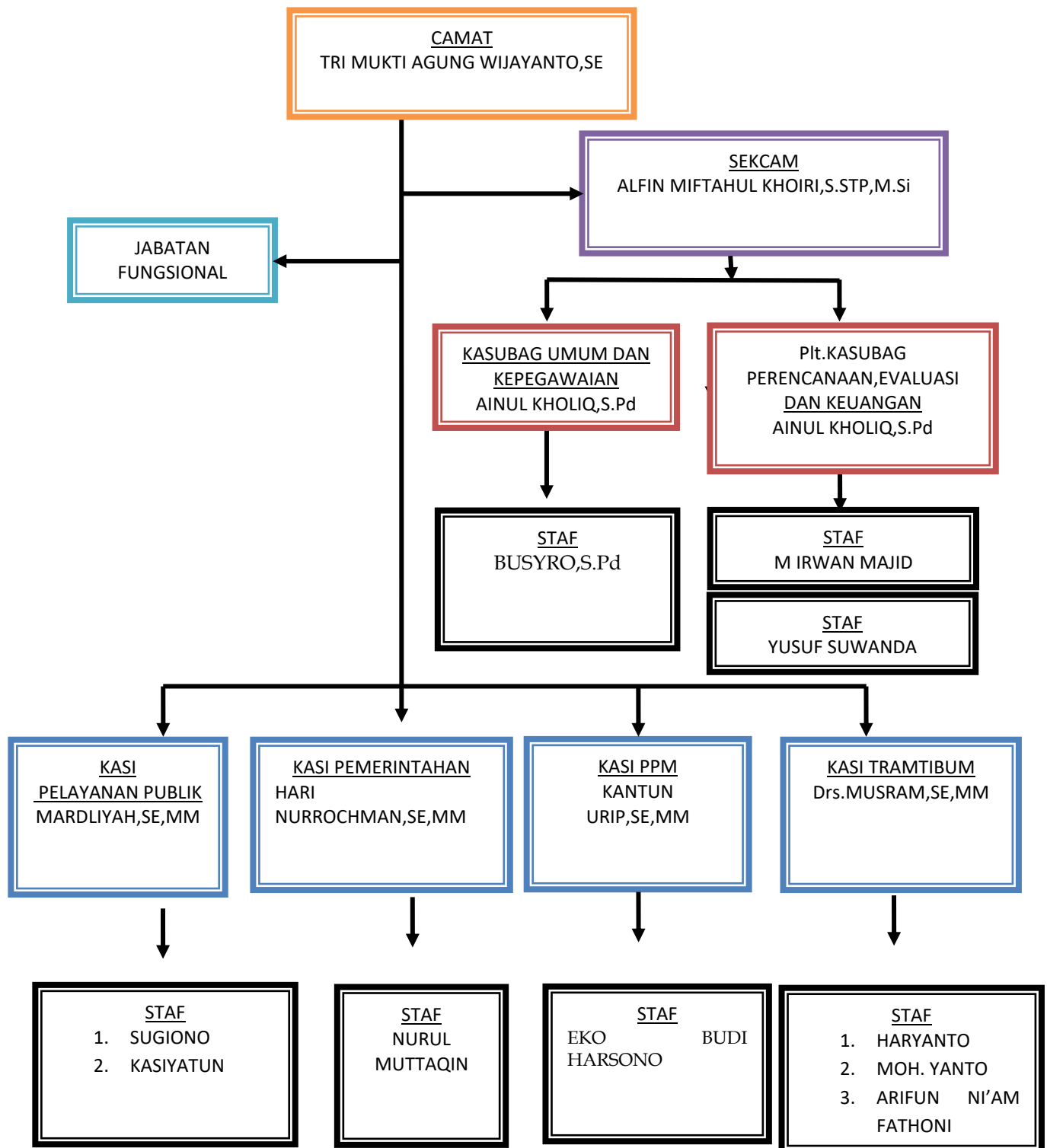
e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi staf :

- a. Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelaksana / petugas ketentraman dan ketertiban Umum.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik membawahi staf :

- a. Pengolah Data Pelayanan.
- b. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan.
- c. Analisis Pelayanan Publik.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN SOLOKURO



C. Data Umum Organisasi.

Sumber Daya Kecamatan Solokuro.

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 tahun 2001 Camat dibantu beberapa personil, Sarana dan Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :

1. Personil Kecamatan Solokuro.

Tabel 1.1
Data Personil Kecamatan Solokuro

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat / Gol / Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	6	8
1	Camat	1	Penata Tk I (III/d)	S 2	
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S2	
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata Tk.I (III/d)	S2	
4	Kasi Pelayanan Publik	1	Pembina (IV/a)	S 2	
5	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Pembina (IV/a)	S 2	
6	Kasi Tramtibum	1	Penata Tk.I (III/d)	S 2	
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Penata . (III/c)	S 1	
8	Kasubag Perencanaan,Evaluasi dan Keuangan				
9	Staf Kasi Pemerintahan	1	Pengatur (II/c)	SLTA	
10	Staf Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	1	Pengatur (II/c)	SL	
11	Staf	1	Tenaga Kontrak Kontrak Bupati	S1	
12	Staf	5	Tenaga Kontrak OPD	S 1	
	Staf	2	Tenaga Kontrak OPD	SLTA	
J U M L A H		17			

**Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
(lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).**

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana
Kantor Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Pendopo,Kantor	1 UNIT	
2.	Rumah Dinas	1 UNIT	
3.	MOBIL PANTER	1 UNIT	
4.	SEPEDA MOTOR	6 UNIT	
5.	KOMPUTER	6 UNIT	
6.	PRINTER	4 UNIT	
7.	ALMARI KAYU	1 UNIT	
8	MEJA KERJA	16 UNIT	
9	MEJA KOMPUTER	6 UNIT	
10	MEJA PERTEMUAN	4 UNIT	
11	KURSI TAMU	3 SET	
12	STAPOL/UPS	3 UNIT	
13	KIPAS ANGIN	3 UNIT	
14	KURSI KAYU	5 UNIT	
15	FILLING KABINET	5 UNIT	
16	KURSI LIPAT BUSA	14 UNIT	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Ket
17	KURSI BIRO	1 UNIT	
18	KURSI PLASTIK	75 UNIT	
19	RAK KAYU	2 UNIT	
20	RAK BESI	1 UNIT	
21	TELIVISI	1 UNIT	

22	TIANG BENDERA	1 UNIT	
23	PESAWAT HT	1 UNIT	
24	PETA KECAMATAN	1 UNIT	
25	PODIUM/MIMBAR	1 UNIT	
26	SOUND SISTEM	1 UNIT	
27	PESAWAT TELEPON	2 UNIT	
28	PAPAN DATA/KEGIATAN	2 UNIT	
29	TEMPAT TIDUR	1 SET	
30	MESIN POTONG RUMPUT	1 UNIT	
31	SCANNER	1 UNIT	
32	CAMERA	1 UNIT	
33	LAMINATING	1 UNIT	
34	AC 1 PK PANASONIK	1 UNIT	
35	HANDYCAM HARDISK SONY HDD 80 GB	1 UNIT	
36	GENSET MERK YAMAHA EF6600E	1 UNIT	
37	LEMARI ARSIP MERK ESPANA ES 104	1 UNIT	
38	LCD PROJECTOR MERK EPSON EB-X11	1 UNIT	
39	TABUNG PEMADAM	1 UNIT	
40	TV	1 SET	

Tabel 1.3
Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang
Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan
OPD Kecamatan Solokuro Tahun 2023

**REKAPITULASI MUTASI TAMBAH DAN KURANG BMD
INTRAKOMPTABEL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

No. Urut	Gol	Kode	NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL TAHUN 2023	PENGHAPUSAN ASET	BELANJA MODAL	PENYESUAIAN		SALDO AKHIR
		Bidang Barang					BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(5+6+7+8+9)
1	01		Tanah	642.900.000,00	-	-	-	-	642.900.000,00
		01	Tanah	642.900.000,00	-	-	-	-	642.900.000,00
2	02		Peralatan dan Mesin	1.345.709.372,00	-	48.870.000,00	-	-	1.394.579.372,00
		02	Alat besar	-	-	-	-	-	-
		03	Alat angkutan	599.653.522,00					599.653.522,00
		04	Alat bengkel	-					-
			Alat ukur	-					-
		05	Alat pertanian	-					-
		06	Alat kantor dan rumah tangga	333.595.800,00		29.920.000,00			363.515.800,00
		07	Alat Studio dan komunikasi	101.882.000,00		-			101.882.000,00
		08	Alat kedokteran	-					-
		09	Alat laboratorium	-					-
		10	Komputer	310.578.050,00		18.950.000,00			329.528.050,00
3	03		Gedung & bangunan	2.140.642.127,00	-	-	-	-	2.140.642.127,00
		11	Bangunan gedung	2.140.642.127,00					2.140.642.127,00
		12	Monumen	-					-
4	04		Jalan, irigasi, dan jaringan	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
		13	Jalan dan jembatan	-	-	-	-	-	-

		14	Bangunan air	-	-	-	-	-	-
		15	Instalasi	-	-	-	-	-	-
		16	Jaringan	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
5	05		Aset tetap lainnya	340.000,00	-	-	-	-	340.000,00
		17	Buku perpustakaan	-	-	-	-	-	-
		18	Barang bercorak kebudayaan	340.000,00	-	-	-	-	340.000,00
		19	Hewan/ternak & tumbuhan	-	-	-	-	-	-
6	06		Konstruksi dlm pengerjaan	-	-	-	-	-	-
			Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-	-
				-					-
JUMLAH				4.139.591.499,00	-	48.870.000,00	-	-	4.188.461.499,00

PENJELASAN MUTASI BERTAMBAH

Hasil pengadaan belanja modal :

48.870.000,00

Peralatan dan Mesin

48.870.000,00

Alat kantor dan rumah tangga

29.920.000,00

Alat Studio dan komunikasi

19.950.000,00

3. Pembiayaan.

Dalam tahun 2023 Anggaran Keuangan guna menunjang kegiatan keberhasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada unit kerja Kantor Kecamatan Solokuro selama 1 tahun sebesar Rp. 1.968.182.000,-

D.Sistematika Penyajian LKJ IP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Solokuro di susun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok, Fungsi dan struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
 - 1. Personil
 - 2. Sarana dan Prasarana
 - 3. Pembiayaan
- D. Sistematika Penyajian LKJIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

- A. Rencana Strategis
 - 1. Tujuan
 - 2. Sasaran
- B. Rencana Kinerja Tahun 2023 Program dan Kegiatan
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .

- A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

- 1. Perbandingan Kinerja Organisasi kinerja tahun 2023 ;
- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
- 3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RJMD/RENSTRA
- 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
- 5. Analisa Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif, solusi yang telah dilakukan ;
- 6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana dan SDM) ;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP .

1. KESIMPULAN.

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi.

2. SARAN.

Pada sub bab ini diuraikan langkah – langkah di masa datang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN .

1. Metriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2021 – 2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis .

Berpedoman dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan masyarakat desa serta Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,terkendalai dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan,menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada ,maka Visi Kecamatan Solokuro adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah Kecamatan Solokuro Tahun 2021-2026, selanjutnya Menetapkan Kinerja Kecamatan Solokuro dalam setiap Tahun Anggaran .
2. Menyusun Rencana Kerja Skala Prioritas dalam setiap Tahun Anggaran.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Legislatif dan antar Eksekutif untuk menarik program-program Pembangunan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN agar dilaksanakan di wilayah Kecamatan Solokuro.
4. Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan investasi , dari para investor lokal maun asing untuk produktifitas industri yang menunjang pendayagunaan Sumber Daya Alam lokal.
5. Melengkapi sarana prasarana dan peningkatan SDM yang menunjang kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Kecamatan , Desa dan Kelurahan
7. Menjalin kemitraan aparat dan rakyat untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat.

1. Tujuan.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan”**

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke – 5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026,

Tabel 2.1
Misi, Tujuan Dan Sasaran Kegiatan

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKAT OR SASARA N	KETERANGAN
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan Solokuro dalam rangka mendukung pencapaian misi ke - 5 ditetapkan 1 (Satu) tujuan yaitu:

1. Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

2. Sasaran Dan Indikator Kinerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Solokuro Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Solokuro Tahun 2021- 2026

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET.
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 PROGRAM DAN KEGIATAN.

B.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Solokuro memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Kecamatan Solokuro serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan Solokuro secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda. dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (take holder) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah di atasnya
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, sebagaimana tabel Rencana Kerja Tahun 2023 di bawah ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Solokuro yang telah direncanakan pada awal tahun 2023 dan sudah dilaksanakan sampai pada triwulan ke IV telah terjadi perubahan anggaran sehingga Kecamatan Solokuro melakukan review perubahan anggaran sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten yang telah disahkan sebagaimana tabel dibawah ini.

B.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Solokuro antara lain :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

a. Sub Program : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Sub Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis realisasi Anggaran.

c. Sub Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Sub Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Sub Program : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

f. Sub Program : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan

1. Pengadaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

g. Sub Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

a. Sub Program : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum

Kegiatan :

1. Kooordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

b. Sub Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

a. Sub Program : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b. Sub Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Program : Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tk I dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitas Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa
4. Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum

Tabel 2.3

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA OPD KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2023

NAMA OPD : KECAMATAN SOLOKURO

Tabel 2.3

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA OPD KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2023

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	01.01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Kec.Solokuro	100%	1.817.471.280	Dana Aokasi Umum		100%	1.817.471.280
7	01.01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	Kec.Solokuro	100%	33.000.000	Dana Aokasi Umum		100%	33.000.000
7	01.01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang terselesaikan	Kec.Solokuro	1 dokumen laporan Renja / Renstra	11.000.000	Dana Aokasi Umum		1 dokumen laporan Renja / Renstra	11.000.000
7	01.01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Solokuro	3 Kali	11.000.000	Dana Aokasi Umum		3 Kali	11.000.000
7	01.01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang terselesaikan	Kec.Solokuro	1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	11.000.000	Dana Aokasi Umum		1 dokumen laporan LKPJ, LKJIP, LPPD	11.000.000

7	01.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun	Kec.Solokuro	100%	1.292.352.869	Dana Aokasi Umum		100%	1.292.352.869
7	01.01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	Kec.Solokuro	14 SPJ Gaji	1.252.352.869	Dana Aokasi Umum		14 SPJ Gaji	1.252.352.869
7	01.01	2.02	02	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang terselesaikan	Kec.Solokuro	14 Laporan	20.000.000	Dana Aokasi Umum		4 Laporan	20.000.000
7	01.01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	Kec.Solokuro	2 Laporan	10.000.000	Dana Aokasi Umum		1 Laporan	10.000.000
7	01.01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang terselesaikan tepat waktu	Kec.Solokuro	14 Laporan	10.000.000	Dana Aokasi Umum		14 Laporan	10.000.000
7	01.01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	Kec.Solokuro	100%	22.000.000	Dana Aokasi Umum		100%	22.000.000
7	01.01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Kec.Solokuro	20 Stel	22.000.000	Dana Aokasi Umum		20 Stel	22.000.000
7	01.01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	Kec.Solokuro	100%	89.941.000	Dana Aokasi Umum		100%	89.941.000
7	01.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kec.Solokuro	10 Item	9.222.000	Dana Aokasi Umum		10 Item	9.222.000
7	01.01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpenuhi	Kec.Solokuro	20 item	23.439.000	Dana Aokasi Umum		20 item	23.439.000
7	01.01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	Kec.Solokuro	15 Item	30.000.000	Dana Aokasi Umum		15 Item	30.000.000
7	01.01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kec.Solokuro	8 Jenis	4.860.000	Dana Aokasi Umum		8 Jenis	4.860.000

7	01.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Kec.Solokuro	800 Kotak Nasi 50 dus air	22.420.000	Dana Aokasi Umum		800 Kotak Nasi 50 dus air	22.420.000
7	01.01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Solokuro	100%	42.092.800	Dana Aokasi Umum		100%	42.092.800
7	01.01	2.07	05	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan mebeler yang tercukupi	Kec.Solokuro	1 Buah Backdrop	27.092.800	Dana Aokasi Umum		10 item	27.092.800
7	01.01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang tercukupi	Kec.Solokuro	1 camera slr, 1 set Komputer	15.000.000	Dana Aokasi Umum		1 camera slr, 1 set Komputer	15.000.000
7	01.01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Solokuro	100%	247.106.631	Dana Aokasi Umum		100%	247.106.631
7	01.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Kec.Solokuro	3 Rekening	46.062.631	Dana Aokasi Umum		3 Rekening	46.062.631
7	01.01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Solokuro	3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer, 11 unit komputer dan 42 Jenis ATK	25.000.000	Dana Aokasi Umum		3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer, 11 unit komputer dan 42 Jenis ATK	25.000.000
7	01.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Solokuro	8 orang	176.044.000	Dana Aokasi Umum			176.044.000
7	01.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Solokuro	100%	90.977.980	Dana Aokasi Umum		100%	90.977.980
7	01.01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kec.Solokuro	1 Mobil 6 Unit Motor	30.595.000	Dana Aokasi Umum		1 Mobil 6 Unit Motor	30.595.000

7	01.01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec.Solokuro	1 Mobil 6 Unit Motor	4.266.200	Dana Aokasi Umum		1 Mobil 6 Unit Motor	3.960.000
7	01.01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Kec.Solokuro	3 Paket	56.116.780	Dana Aokasi Umum		3 Paket	31.000.000
7	01.02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	Kec.Solokuro	100%	48.430.720	Dana Aokasi Umum		100%	69.109.650
7	01.02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Solokuro	100%	31.930.720	Dana Aokasi Umum			52.609.650
7	01.02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Solokuro	5 Jenis	31.930.720	Dana Aokasi Umum		5 Jenis	52.609.650
0	01.02	2.03		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mendapat Fasilitas Kemiskinan	Kec.Solokuro	100%	16.500.000	Dana Aokasi Umum		3 Kegiatan	16.500.000
7	01.02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana Pelayanan Umum	Kec.Solokuro	3 Kegiatan	16.500.000	Dana Aokasi Umum		3 Kegiatan	16.500.000
7	01.03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec.Solokuro	100%	39.000.000	Dana Aokasi Umum		100%	48.738.350
7	01.03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan	Kec.Solokuro	100%	33.000.000	Dana Aokasi Umum	100%	3 Kegiatan	48.738.350

7	01.03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	Kec.Solokuro	2 Kali	16.500.000	Dana Aokasi Umum		2 Kali	16.500.000
7	06	02.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec.Solokuro	3 Kegiatan	16.500.000	Dana Aokasi Umum		4 Kegiatan	16.500.000
7	01.03	2.01		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Kec.Solokuro		6.000.000	Dana Aokasi Umum	100%		6.000.000
7	01.03	2.01	01	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kec.Solokuro		6.000.000	Dana Aokasi Umum			6.000.000
7	01.06			PROGRAM PEMBUNAAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentasi Program Penata Tk I dan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Solokuro	100%	66.000.000	Dana Aokasi Umum		100%	66.000.000
7	01.06	2.01		Fsilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tk I dan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tk I dan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Solokuro	100%	63.280.000	Dana Aokasi Umum		100%	63.280.000
7	01.06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa	Kec.Solokuro	10 Desa	15.700.000	Dana Aokasi Umum		2 Kegiatan	15.700.000
7	01.06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Solokuro	10 Desa	14.580.000	Dana Aokasi Umum		4 Kegiatan	14.580.000

7	01.06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Kec.Solokuro	3 Kegiatan	16.500.000	Dana Aokasi Umum		3 Kegiatan	16.500.000
7	01.06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Penata Tk lan Pengendalian keamanan yang dilaksanakan	Kec.Solokuro	3 Kali	16.500.000	Dana Aokasi Umum		3 Kegiatan	16.500.000
Jumlah								1.968.182.000				1.968.182.000

Tabel 2.4
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kode					Program / Kegiatan	APBD 2023	APBD PAK 2023	Berkurang/ Bertambah
1					2	3	4	5
7					KEWILAYAHAN.	2.035.720.000	1.968.182.000	-67.538.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.775.378.480	1.817.471.280	-61.618.000
7	01	01	2.01		Kegiatan. 1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.000	33.000.000	0
7	01	01	2.01	01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	11.000.000	11.000.000	0
7	01	01	2.01	06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000.000	11.000.000	0
7	01	01	2.01	07	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	11.000.000	0
7	01	01	2.02		Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan PD	1.359.890.869	1.292.352.869	-67.538.000
7	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.319.890.869	1.252.352.869	-67.538.000
7	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000	20.000.000	-0
7	01	01	2.02	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	0
7	01	01	2.02	08	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	10.000.000	0
7	01	01	2.05		Kegiatan : 3. Administrasi Kepegawaian PD	22.000.000	22.000.000	0
7	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	22.000.000	0
7	01	01	2.06		Kegiatan : 4. Administrasi Umum PD	84.021.000	89.941.000	5.920.000
7	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.222.000	9.222.000	0
7	01	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.439.000	23.439.000	0
7	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	30.000.000	0
7	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang undangan	4.860.000	4.860.000	0
7	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.500.000	22.420.000	5.920.000

7	01	01	2.07		Kegiatan : 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.092.800	42.092.800	0
7	01	01	2.07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	27.092.800	27.092.800	0
7	01	01	2.07	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	15.000.000	15.000.000	0
7	01	01	2.08		Kegiatan : 6. Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247.106.631	247.106.631	0
7	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan Listrik	46.062.631	46.062.631	0
7	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	0
7	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.044.000	176.044.000	0
7	01	01	2.09		Kegiatan : 7. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	90.977.980	90.977.980	0
7	01	01	2.09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.595.000	30.595.000	0
7	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.266.200	4.266.200	0
7	01	02	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.116.780	56.116.780	0
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	51.630.720	48.430.720	-3.200.000
7	01	02	2.01		Kegiatan 8.Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Prasarana Pelayanan Umum	16.500.000	16.500.000	0
7	01	02	2.01	01	Koordinasi /sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	16.500.000	16.500.000	0
7	01	02	2.02		Kegiatan 9.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan	35.130.720	31.930.720	0
7	01	02	2.02	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	35.130.720	31.930.720	0
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.000.000	48.738.350	3.138.350
7	01	03	2.01		Kegiatan 10.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.000.000	33.000.000	0
7	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000	16.500.000	0
7	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	16.500.000	16.500.000	0
7	01	03	2.06		Kegiatan 11.Pemberdayaan dan Kesejahteraan tingkat kecamatan dan kelurahan	6.000.000	6.000.000	0
7	01	03	2.06	03	Peningkatan ketahanan pangan keluarga	6.000.000	6.000.000	0

7	01	06	20.1		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	66.000.000	63.280.000	-2.720.000
7	01	06	20.1		Kegiatan 12.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Penata Tk lan dan Pengawasan Pemerintah Desa	66.000.000	63.280.000	-2.720.000
7	01	06	20.1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	16.500.000	15.700.000	-800.000
7	01	06	20.1	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asset Desa	16.500.000	14.580.000	-1.920.000
7	01	06	20.1	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.500.000	16.500.000	0
7	01	06	20.1	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Kentraman dan Ketertiban Umum	16.500.000	16.500.000	0
JUMLAH						2.035.720.000	1.968.182.000	-67.538.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Pada tahun 2023 Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja Kecamatan Solokuro telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan , program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan datang.

Adapun Perjanjian Kinerja yang kami buat mulai Eselon III, IV dan Staf, Perjanjian Kinerja tersebut terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan, Sasaran Strategis (Renstra). Kecamatan Solokuro yang meliputi Program dan Kegiatan tahun 2023 Kecamatan Solokuro dengan menetapkan 4 Program 12 Kegiatan dan 30 Sub Kegiatan



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO,SE**

Jabatan : Camat Solokuro Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A**

Jabatan : Bupati Lamongan

*selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA***

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A

Solokuro, Agustus 2023

PIHAK PERTAMA
CAMAT SOLOKURO

TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO,SE

Penata Tk I
NIP. 19681130 201001 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN SOLOKURO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	A 83,33
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	2 Desa

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.817.471.280,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	48.430.720.,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.000.000,00	APBD
4.	Program Penata Tk I dan Pengawasan: Pemerintahan Desa	63.280.000,00	APBD
	JUMLAH	1.968.182.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A

Solokuro, Agustus 2023
 PIHAK PERTAMA
CAMAT SOLOKURO

TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, SE
 Penata Tk I
 NIP. 19681130 201001 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Urusan Kewilayahan Kecamatan Solokuro mempunyai peran strategis dalam mendukung dan mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan Pelayanan publik di kecamatan, guna meningkatkan pelayanan publik di kecamatan Solokuro telah menyusun perencanaan kerja dan telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

A.1 Capaian Kinerja Kecamatan Solokuro

Tabel 3.1
Capain Kinerja Kecamatan Solokuro

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFESIENSI
			Target	Capaian	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
1	Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.	81,72 IKM	81,77 IKM	100.16	31.930.720	27.984.000	87,64	
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	2 Desa	2 desa	100	63.280.000	43.705.700	69,08	

Capaian kinerja tahun 2023 Kantor Kecamatan Solokuro dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, yang pertama ialah sasaran kinerja meningkatnya layanan Publik yang inovatif dengan target kinerja Nilai Hasil Survei kepuasan masyarakat sebesar 81,72 terealisasi Nilai IKM sebesar 81,77 pada tahun 2023. Sedangkan untuk sasaran kinerja kedua adalah Meningkatkan kemandirian desa dengan target kinerja prosentase peningkatan jumlah Desa Maju sebesar 2 Desa tercapai sebanyak 2 Desa atau 100 %

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel III.2.1
Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja
Kecamatan Solokuro Tahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN RENJA		KETERANGAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	REALISASI	REALISASI %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100%	1.817.471.280	100%	100%	1.624.067.196	89,36	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Yang Selaras	100%	33.000.000	100%	100%	28.476.000	86,29	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang terselesaikan	1 dokumen laporan Renja / Renstra	11.000.000	1 dokumen laporan Renja / Renstra	100%	9.916.000	90,15	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Kali	11.000.000	4 Kali	100%	9.320.000	84,73	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang terselesaikan	5 Laporan	11.000.000	5 Laporan	100%	9.240.000	84	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100%	1.292.352.869	100%	100%	1.213.556.134	93,9	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayar	14 SPJ Gaji	1.252.352.869	14 SPJ Gaji	100%	1.177.254.634	94	

	Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang terselesaikan	14 Laporan	20.000.000	14 Laporan	100%	19.291.500	96,46	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	100%	8.060.000	80,6	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran yang terselesaikan tepat waktu	14 Dokumen	10.000.000	14 Dokumen	100%	8.950.000	89,5	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Aparatur yang di siplin	100%	22.000.000	100%	100%	21.956.000	99,8	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	20 Stel	22.000.000	20 Stel	100%	21.956.000	99,8	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Perangkat Daerah	100%	89.941.000	100%	100%	35.954.500	39,98	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Intem Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	10 Item	9.222.000	10 Item	100%	6.950.000	75,36	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang terpenuhi	20 item	23.439.000	20 item	100%	-	0	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengadaan	15 Item	30.000.000	15 Item	100%	14.984.500	49,95	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	8 Jenis	4.860.000	8 Jenis	100%	-	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	221 box nasi, 200 box Snack, 53 Piring Buah siap saji, 5 Dus Air mineral 7 Gelas Kopi	22.420.000	221 box nasi, 200 box Snack, 53 Piring Buah siap saji, 5 Dus Air mineral 7 Gelas Kopi	100%	14.020.000	62,53	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	42.092.800	100%	100%	27.070.000	64,31	
	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan mebeler yang tercukupi	4 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Meja Kerja	27.092.800	4 Unit Kursi Kerja, 1 Unit Meja Kerja	100%	27.070.000	99,92	
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya yang tercukupi	1 Unit Notebook	15.000.000	1 Unit Notebook	100%	-	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	247.106.631	100%	100%	221.580.262	89,67	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	3 Rekening	46.062.631	3 Rekening	100%	30.122.022	65,39	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer, 11 unit komputer dan 42 Jenis ATK	25.000.000	3 Unit laptop, 10 unit AC, 10 Unit printer, 11 unit komputer dan 42 Jenis ATK	100%	17.250.000	69	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terpenuhi	8 orang	176.044.000	8 orang	100%	174.208.240	98,96	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi tepat waktu	100%	90.977.980	100%	100%	75.474.300	82,96	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Mobil 6 Unit Motor	30.595.000	1 Mobil 6 Unit Motor	100%	18.150.000	59,32	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 Kendaraan	4.266.200	2 Kendaraan	100%	27.070.000	28,7	

	dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan pajak dan perizinanya tepat waktu							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Paket	56.116.780	2 Paket		56.100.000	99,97	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel	100%	48.430.720	100%		37.734.000	77,91	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	31.930.720	100%		27.984.000	87,64	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Jenis	31.930.720	5 Jenis		27.984.000	87,64	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	Prosentase Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	16.500.000	100%		9.750.000	59,09	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam pemeliharaan sarana Pelayanan Umum	3 Kegiatan	16.500.000	3 Kegiatan		9.750.000	59,09	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Prosentase Program Pemberdayaan	100%	39.000.000	100%		22.225.000	56,99	

	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat Desa dan Kelurahan							
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	33.000.000	100%	100%	16.525.000	50,08	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	2 Kali	16.500.000	2 Kali	100%	11.075.000	67,12	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemeberdayaan Masyarakat di Wilayah Kcamatan	3 Kegiatan	16.500.000	3 Kegiatan	100%	5.450.000	33,03	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	100%	6.000.000	100%	100%	5.700.000	95	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Penurunan Jumlah Stunting di Tingkat Kecamatan dan Desa	5 Kegiatan	6.000.000	5 Kegiatan	100%	5.700.000	95	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentasi Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	63.280.000	100%	100%	43.705.700	69,07	
	Fsilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	63.280.000	100%	100%	43.705.700	69,07	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi tata pemerintahan desa	10 Desa	15.700.000	10 Desa	100%	9.395.700	59,85	

	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Desa	14.580.000	10 Desa	100%	9.150.000	62,76	
	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Dearah dengan Pembangunan Desa	4 Kali	16.500.000	4 Kali	100%	12.460.000	75,52	
	Fasilitas Penyelenggaraan Kententrman dan Ketertiban Umum	Jumlah pembinaan Pengendalian keamanan yang dilaksanakan	3 Kali	16.500.000	3 Kali	100%	12.700.000	76,97	
				1.968.182.000			1.727.731.896	87,78	

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi				Perkem- bangan %
			Akhir Tahun 2019	Akhir Tahun 2020	Akhir Tahun 2021	Akhir Tahun 2023	
1	2	3	6	7	7	8	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Program Penata Tk I dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase Penata Tk I dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional (Jika ada / Khusus bagi PD. yang memiliki SPM).

A.5. Analisis Kinerja Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan:

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Solokuro selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kesusuaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja.

Keberhasilan :

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

Keberhasilan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Solokuro pada tahun anggaran 2023, yang meliputi 4 Program dan 12 Kegiatan adalah adanya perubahan kinerja melalui camat diantaranya

- a. Mengefektifkan semua stakeholder kantor kecamatan Solokuro mulai Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala sub bagian dan staff untuk bersinergi dalam merealisasikan program sehingga tepat kegiatan, tepat waktu dan efisiensi anggaran.
- b. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi program serta realisasinya secara berkala setiap dua minggu sekali dengan sekretaris kecamatan, para Kasi dan Kasubag.
- c. Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2021. Upacaya tersebut untuk mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran Kecamatan Solokuro, Hal tersebut terlihat dari Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Capaian Kinerja mencapai 100% dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,77 dari target nilai 81,61 sedangkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Capaian Kinerja mencapai 100 %

Kegagalan :

Dalam Pemenuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan serta Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya belum bias terpenuhi karena adanya pengurangan Anggaran/ Tunda Bayar

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 ada peningkatan kinerja ada kendala pengurangan anggaran pada pos pos tersebut.

A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 Kecamatan Solokuro telah menganalisis efisiensi sumberdaya terkait dengan Dana, Sarana dan Prasarana serta SDM dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan meskipun ada dana lebih di DPA
2. Melaksanakan pengawasan dalam penggunaan anggaran
- 3.
4. Melaporkan hasil kinerja beserta penggunaan anggaran secara berkala

A.7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terjalannya suatu koordinasi dan kerja sama yang baik antar Pimpinan, Kasi, Kasubag dan semua Staf dengan didukung Sarana dan Prasarana yang baik serta dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing, serta Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sehingga target yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian kinerja tahun 2023 Kecamatan Solokuro telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dari Triwulan I s/d IV pada tahun 2023 sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3.4
REALISASI PENJABARAN BELANJA KECAMATAN SOLOKURO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING					URAIAN KEGIATAN	APBD PAK 2023	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
1					2	3	4	5
7.01	61	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.817.471.280	1.624.067.196	89,36
7.01	61	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.000.000	28.476.000	86,29
7.01	61	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.000.000	9.916.000	90,15
7.01	61	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.000.000	9.320.000	84,73
7.01	61	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	9.240.000	84
7.01	61	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.292.352.869	1.213.556.134	93,9
7.01	61	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.252.352.869	1.177.254.634	94
7.01	61	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000	19.291.500	96,46
7.01	61	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	8.060.000	80,6
7.01	61	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000	8.950.000	89,5
7.01	61	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	21.956.000	99,8
7.01	61	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22.000.000	21.956.000	99,8

7.01	61	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.941.000	35.954.500	39,98
7.01	61	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.222.000	6.950.000	75,36
7.01	61	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.439.000	-	0
7.01	61	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	14.984.500	49,95
7.01	61	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.860.000	-	0
7.01	61	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.420.000	14.020.000	62,53
7.01	61	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.092.800	27.070.000	64,31
7.01	61	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	27.092.800	27.070.000	99,92
7.01	61	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	-	0
7.01	61	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.106.631	221.580.262	89,67
7.01	61	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.062.631	30.122.022	65,39
7.01	61	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	17.250.000	69
7.01	61	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	176.044.000	174.208.240	98,96
7.01	61	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.977.980	75.474.300	82,96
7.01	61	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.595.000	18.150.000	59,32
7.01	61	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.266.200	1.224.300	28,7
7.01	61	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56.116.780	56.100.000	99,97
7.01	61	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.430.720	37.734.000	77,91
7.01	61	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	31.930.720	27.984.000	87,64
7.01	61	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.930.720	27.984.000	87,64
7.01	61	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	16.500.000	9.750.000	59,09
7.01	61	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	16.500.000	9.750.000	59,09
7.01	61	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	39.000.000	22.225.000	56,99
7.01	61	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.000.000	16.525.000	50,08

7.01	61	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.500.000	11.075.000	67,12
7.01	61	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.500.000	5.450.000	33,03
7.01	61	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	6.000.000	5.700.000	95
7.01	61	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6.000.000	5.700.000	95
7.01	61	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	63.280.000	43.705.700	69,07
7.01	61	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.280.000	43.705.700	69,07
7.01	61	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15.700.000	9.395.700	59,85
7.01	61	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.580.000	9.150.000	62,76
7.01	61	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16.500.000	12.460.000	75,52
7.01	61	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.500.000	12.700.000	76,97
JUMLAH BELANJA						1.968.182.000	1.727.731.896	87,78

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Kecamatan Solokuro dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Solokuro berdasarkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan Solokuro dalam mencapai kinerja tahun 2023, menetapkan 4 Program dan 12 Kegiatan 30 Sub Kegiatan, yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Solokuro sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penata Tk I dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 4 (Empat) Program dan 12 (Duabelas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan. Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai

B. S A R A N

1. Dukungan pihak Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan program dan sasaran sehingga kegiatan / proyek dapat terselenggara dengan baik
2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan pemenuhan sarana / prasarana kerja dan pelayanan masyarakat.
3. Terjalinnya hubungan yang baik antara semua pihak yang terkait sehingga dapat terciptanya hubungan yang harmonis sehingga Pelaksanaan Program Pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Perlu kiranya bahwa penyusunan LKjIP Kecamatan Solokuro ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya perbaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - permasalahan yang ada, maka masih perlu adanya Pembinaan lebih lanjut guna penyempurnaan

Solokuro, Januari 2023



KAMAT/SOLOKURO

TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO,SH

Penata Tk I

Nip. 19681130 201001 1 002

LAMPIRAN LKjIP KECAMATAN SOLOKURO TAHUN 2021

- 1. Metrik Rencana Strategis (RS) Tahun 2021 – 2026**
- 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023**
- 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 4. Lampiran Lainnya (Penghargaan , Inovasi Dsb)**

**MATRIK RENSTRA KECAMATAN SOLOKURO MATRIK RENSTRA KECAMATAN SOLOKURO
TAHUN 2021-2026**

MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN 1	INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	BASE LINE 2021	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2021	2023	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,33	81,33	81,55	81,72	81,89	82,06	82,23	82,23

Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD			Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Kepuasan masyarakat	-	81,50	81,55	81,72	81,89	82,06	82,23	82,23
2.	Nilai Sakip Kecamatan	82.92	82.92	83.05	83.33	83.60	83.88	83.93	82.92
3.	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	10%	20%	60%	80%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Desa Maju	6 Desa	6 Desa	4 Desa	2 Desa	-	-	-	-
5	Presentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	Kode				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 s/d 2026 (Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja SKPD Tahun lalu 2021		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (2022) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (%)		Unit SKPD Penang- gung Jawab	Keteran- gan		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp												
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12+6		14 = 12/7 x 100%		15 = 14/5 x 100%		16	17		
					KEWILAYAHAN		100%	2.421.328.270		1.733.198.372		2.069.722.383	13%	278.352.990	24%	486.554.339	0%		0%		82%	1.693.596.163		3.426.794.535	81,83%	1.693.596.163	69,94%					
7	01	01	a		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik	100%	2.316.328.270	70%	1.609.930.622		1.890.072.383	14%	272.152.990	0	435.454.339	0	487.071.875	22%	408.506.959	85%	1.603.186.163		3.213.116.785	84,82%	1.603.186.163	69,21%		Kec. Solokur o			
7	01	2,01	a	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	65.000.000	100%	29950000	100%	51.970.000	17%	8.800.000	0	12.558.900	-	-	34%	17.910.000	76%	39.268.900		69.218.900	75,56%	39.268.900	60,41%		Kec. Solokur o			
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	25.000.000	100%	14030000	100%	15.000.000	20,00%	3.000.000	28%	4.208.900	0%	-	27%	4.000.000	75%	11.208.900		25.238.900	74,73%	11.208.900	44,84%		Kec. Solokuro			
7	01	01	2,06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	20.000.000	100%	7100000	100%	15.000.000	15,33%	2.300.000	27%	4.100.000	0%	-	35%	5.240.000	78%	11.640.000		18.740.000	77,60%	11.640.000	58,20%		Kec. Solokuro			
7	01	01	2,07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20.000.000	100%	8820000	100%	21.970.000	15,93%	3.500.000	19%	4.250.000	0%	-	39%	8.670.000	75%	16.420.000		25.240.000	74,74%	16.420.000	82,10%		Kec. Solokuro			
7	01	02	a		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.628.056.000	0%	1.245.792.686		1.362.487.413	15%	211.083.318	23%	306.741.434	28%	380.812.859	23%	307.822.959	89%	1.206.460.570		2.452.253.256	88,55%	1.206.460.570	74,10%		Kec. Solokur o			
7	01	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%	1.568.056.000	77%	1.206.677.786	92%	1.313.205.613,00	15,69%	206.083.318	22%	292.441.434	28%	370.812.859	23%	304.672.959	89%	1.174.010.570		2.380.688.356	89,40%	1.174.010.570	74,87%		Kec. Solokuro			
7	01	02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	20.000.000	100%	19996300	100%	19.281.800	15,56%	3.000.000	18%	3.500.000	41%	8.000.000	16%	3.150.000	92%	17.650.000		37.646.300	91,54%	17.650.000	88,25%		Kec. Solokuro			
7	01	02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang disusun	100%	20.000.000	100%	9798600	100%	15.000.000	0,00%		37%	5.500.000	13%	2.000.000	0%	-	50%	7.500.000		17.298.600	50,00%	7.500.000	37,50%		Kec. Solokuro			
7	01	02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	20.000.000	100%	9320000	100%	15.000.000	13,33%	2.000.000	35%	5.300.000	0%	-	0%	-	49%	7.300.000		16.620.000	48,67%	7.300.000	36,50%		Kec. Solokuro			

7	01	02.05	a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas, Pakaian Khas dan Batik yang disediakan	100%	20.000.000	100%	0	13.760.000	0%	0	0%	-	98%	13.528.000	0%	-	98%	13.528.000	13.528.000	98,31%	13.528.000	67,64%
7	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	100%	20.000.000	100%	0	13.760.000	0,00%	0	0%	-	98%	13.528.000	0%	-	98%	13.528.000	13.528.000	98,31%	13.528.000	67,64%
7	01	02.06	a	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	165.536.270	100%	75294750	98.799.370	5%	4.500.000	34%	33.470.000	7%	7000000	22%	21779000	68%	66.749.000	142.043.750	67,56%	66.749.000	40,32%
7	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Macam Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	100%	6.000.000	100%	5900000	6.600.000	0,00%	0	61%	4.050.000	0%	-	18%	1.200.000	80%	5.250.000	11.150.000	79,55%	5.250.000	87,50%
7	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah macam Alat Tulis Kantor yang tersedia	100%	33.002.500	100%	29189500	24.998.700	6,00%	1.500.000	4%	900.000	0%	-	59%	14.629.000	68%	17.029.000	46.218.500	68,12%	17.029.000	51,60%
7	01	02.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Macam Barang Cetak, Penggandaan yang disediakan	100%	90.533.770	100%	26043000	40.600.670	0,00%	0	53%	21.620.000	15%	6.000.000	13%	5.200.000	81%	32.820.000	58.863.000	80,84%	32.820.000	36,25%
7	01	02.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan	Jumlah Bulan untuk kebutuhan Referensi Bahan Bacaan dan Iklan kantor yang disediakan	100%	6.000.000	100%	6000000	6.600.000	15,15%	1.000.000	45%	3.000.000	0%	-	0%	-	61%	4.000.000	10.000.000	60,61%	4.000.000	66,67%
7	01	02.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makan minum kantor yang tersedia	100%	30.000.000	100%	8162250	20.000.000	10,00%	2.000.000	20%	3.900.000	5%	1.000.000	4%	750.000	38%	7.650.000	15.812.250	38,25%	7.650.000	25,50%
7	01	02.07	a	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase barang milik daerah yang disediakan	100%	80.000.000	100%	0	54.393.500	0%	0	0%	-	0%	-	99%	53.995.000	99%	53.995.000	53.995.000	99,27%	53.995.000	67,49%
7	01	02.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	100%	30.000.000	100%	0	15.000.000	0,00%	0	0%	0%	-	97%	14.603.000	97%	14.603.000	14.603.000	97,35%	14.603.000	48,68%	
7	01	02.07	06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	100%	50.000.000	100%	0	39.393.500	0,00%	0	0%	0%	-	100%	39.392.000	100%	39.392.000	39.392.000	100,00%	39.392.000	78,78%	

7	01	02.08	a	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan	100%	268.136.000	76%	204.557.286	100%	244.440.600	19%	45.769.672	28%	67.684.005	22%	53.886.016	0%		68%	167.339.693		371.896.979	68,46%	167.339.693	62,41%
7	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	100%	43.500.000	82%	35.605.576	100%	48.396.600	15,20%	7.356.032	23%	11.241.365	15%	7.443.376	18%	8.686.327	72%	34.727.100		70.332.676	71,76%	34.727.100	79,83%
7	01	02.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	50.000.000	100%	23980000	100%	20.000.000	10,00%	2.000.000	50%	10.000.000	0%	-	29%	5.800.000	89%	17.800.000		41.780.000	89,00%	17.800.000	35,60%
7	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan tepat waktu	100%	174.636.000	83%	144.971.710	100%	176.044.000	20,68%	36.413.640	26%	46.442.640	26%	46.442.640	21%	36.413.640	94%	165.712.560		310.684.270	94,13%	165.712.560	94,89%
7	01	02.09	a	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	89.600.000	100%	54335900	0%	64.221.500	3%	2.000.000	23%	15.000.000	50%	31.845.000	11%	7.000.000	87%	55.845.000		110.180.900	86,96%	55.845.000	62,33%
7	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala	100%	46.000.000	100%	40785900	100%	29.261.500	6,83%	2.000.000	51%	15.000.000	3%	1.000.000	24%	7.000.000	85%	25.000.000		65.785.900	85,44%	25.000.000	54,35%
7	01	02.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Kerja lainnya yang diperbaiki	100%	3.600.000	100%	3600000	100%	3.960.000	0,00%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-		3.600.000	0,00%	-	0,00%
7	01	02.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung / Kantor yang dipelihara secara berkala	100%	40.000.000	100%	9950000	100%	31.000.000	0,00%	0	0%	-	100%	30.845.000	0%	-	100%	30.845.000		40.795.000	99,50%	30.845.000	77,11%

7	02	02.01	a	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%Unit Kerja internal yang Terlayani dengan baik	100%	55.000.000	100%	52757750	69.109.650	0%	-	0	16.000.000	-	-	2%	1.650.000	26%	17.650.000	70.407.750	25,54%	17.650.000	32,09%		Kec. Solokuro	
7	02	02.01	a	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum terlaksana	100%	15.000.000	100%	14740000	16.500.000	0%	0	30%	5.000.000	0%	-	10%	1.650.000	40%	6.650.000	21.390.000	40,30%	6.650.000	44,33%		Kec. Solokuro	
7	02	02.02		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ Instansi Vertikal Terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ Instansi Vertikal Terkait dalam pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	15.000.000	100%	13340000	16.500.000	0,00%	0	30%	5.000.000	0%	-	10%	1.650.000	40%	6.650.000	19.990.000	40,30%	6.650.000	44,33%		Kec. Solokuro	
7	02	02.02	a	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100%	40.000.000	100%	38017750	52.609.650	0%	0	21%	11.000.000	0%	-	48%	24.999.750	68%	35.999.750	74.017.500	68,43%	35.999.750	90,00%		Kec. Solokuro	
7	03			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	40.000.000	100%	37017750	52.609.650	0,00%	0	21%	11.000.000	0%	-	48%	24.999.750	68%	35.999.750	73.017.500	68,43%	35.999.750	90,00%		Kec. Solokuro	
7	03	02.01	a	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah dokumen Musrenbang RKPD yang disusun	100%	35.000.000	100%	20730000	48.738.350	12%	5.700.000	0	14.100.000	0	500.000	26%	12.650.000	68%	32.950.000	53.680.000	67,61%	32.950.000	94,14%		Kec. Solokuro	
7	03	02.01	a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	100%	20.000.000	100%	20730000	48.738.350	12%	5.700.000	29%	14.100.000	1%	500.000	26%	12.650.000	68%	32.950.000	53.680.000	67,61%	32.950.000	164,75%		Kec. Solokuro	
7	03	02.01	a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah festival dan PHBN yang diikuti dan diselenggarakan	100%	15.000.000	100%	8040000	22.238.350	17%	3.700.000	41%	9.100.000	0%	-	20%	4.450.000	78%	17.250.000	25.290.000	77,57%	17.250.000	115,00%		Kec. Solokuro	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-	0		26.500.000	7,55%	2.000.000	19%	5.000.000	2%	500.000	31%	8.200.000	59%	15.700.000	15.700.000	59,25%	15.700.000	#DW/0/			

7	06		a		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	100%	15.000.000	1	49.780.000	1	61.802.000	1%	500.000	0	21.000.000	0	10.000.000	13%	8.310.000	64%	39.810.000		89.590.000	64,42%	39.810.000	265,40%		Kec. Solokuro
7	06	02.01	a		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pengawasan Pemerintahan Desa yang difasilitasi,Rekomendasi dan diPembinaan	100%	15.000.000	100%	49780000	100%	61.802.000	1%	500000	34%	21.000.000	16%	10.000.000	13%	8.310.000	64%	39.810.000		89.590.000	64,42%	39.810.000	265,40%		Kec. Solokuro
7	06	02.01	02	03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa terlayani	100%	15.000.000	100%	13270000	100%	16.500.000	3,03%	500.000	36%	6.000.000	6%	1.000.000	24%	3.920.000	69%	11.420.000		24.690.000	69,21%	11.420.000	76,13%		Kec. Solokuro
7	06	02.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan AsetDesa	Jumlah Desa/Kel. Yang difasilitasi	100%	15.000.000	100%	10970000	100%	16.500.000	0,00%	0	36%	6.000.000	29%	4.800.000	9%	1.500.000	75%	12.300.000		23.270.000	74,55%	12.300.000	82,00%		Kec. Solokuro
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			-		0		14.752.000	0,00%	0	34%	5.000.000	7%	1.000.000	7%	1.000.000	47%	7.000.000		7.000.000	47,45%	7.000.000	0%		
7	06	02.01	09		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	Jumlah Desa yang difasilitasi	100%	15.000.000	100%	12280000	100%	14.050.000	0,00%	0	28%	4.000.000	23%	3.200.000	13%	1.890.000	65%	9.090.000		21.370.000	64,70%	9.090.000	60,60%		Kec. Solokuro
JUMLAH								2.421.328.270		1.733.198.372		2.069.722.383	13,45%	278.352.990	24%	486.554.339	24%	497.571.875	0%		82%	1.693.596.163		3.426.794.535	81,83%	1.693.596.163	69,94%		



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO,SE**

Jabatan : Camat Solokuro Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A**

Jabatan : Bupati Lamongan

*selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA***

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A

Solokuro, Agustus 2023
PIHAK PERTAMA
CAMAT SOLOKURO

TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO,SE
Penata Tk I
NIP. 19681130 201001 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN SOLOKURO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	A 83,33
2.	Meningkatkan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	2 Desa

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.817.471.280,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	48.430.720.,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.000.000,00	APBD
4.	Program Penata Tk I dan Pengawasan Pemerintahan Desa	63.280.000,00	APBD
JUMLAH		1.968.182.000,00	APBD

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A

Solokuro, Agustus 2023

PIHAK PERTAMA
CAMAT SOLOKURO

TRI MUKTI AGUNG WIJAYANTO, SE

Penata Tk I
 NIP. 19631130 201001 1 002



MODEL PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI PROGRAM MAS PEKA

(MALAM SABTU PELAYANAN KEPENDUDUKAN)



- Program Inovasi Pelayanan Kependudukan yang dikemas dengan jargon MAS PEKA (Malam Sabtu Pelayanan Kependudukan) merupakan program inovasi yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Solokuro dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu luang pada siang hari untuk mengurus dokumen kependudukan karena kesibukan bekerja atau sekolah. Program ini dilaksanakan setiap malam sabtu atau Jum'at malam mulai jam 19.00 sampai 21.00 WIB.



Lamongan
Megilan



BUPATI LAMONGAN

PIAGAM PENGHARGAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/184/KEP/413.013/2022 tentang Juara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Lamongan (SINOLLA) Tahun 2022 dengan ini memberikan penghargaan atas inovasi :

Mas Peka

(Malam Sabtu Pelayanan Kependudukan)

KECAMATAN SOLOKURO

sebagai

TOP 15

**KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAMONGAN
(SINOLLA) TAHUN 2022**

LAMONGAN, 26 MEI 2022

BUPATI LAMONGAN



Dr. YUHDONUR EFENDI, MBA.



Kondisi yang diharapkan

Masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan yang mereka harapkan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh pelayanan yang prima

Mampu memecahkan Permasalahan pelayanan Kependudukan secara efektif dan terukur.

Prosentase kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan di Kecamatan Solokuro semakin meningkat

INOVASI

- Program Inovasi Malam Sabtu Pelayanan Kependudukan (MAS PEKA) ini diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu percepatan pemberian identitas yang sah bagi semua warga Kecamatan Solokuro, termasuk Perekaman KTP dokumen pindah datang, tambah jiwa dan pencatatan kelahiran, percepatan tersebut dilaksanakan secara efektif dengan cara memberikan kesempatan waktu luang bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan pada waktu malam hari. Selain itu, bersinambungnya pelaksanaan tata kelola di masa pandemi diharapkan mampu menjangkau banyak warga yang mempunyai dokumen sah kependudukan.